

KONSEP PEMIMPIN IDEAL AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DI TENGAH KRISIS KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Varena Hariyanto Fepi¹, Wilfridus Fon², Georgius Y. A. Subantar³, Fidelis Situ⁴
varinhariyanto@gmail.com¹, wilfridusFon2002@gmail.com², subantargegi@gmail.com³,
fidelissitu3@gmail.com⁴

Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Penulisan artikel ini berkiblat untuk mengulas tentang krisis kepemimpinan di Indonesia. De facto, antara ide pemimpin kepemimpinan dan praksis kepemimpinan memiliki garis demarkasi yang lebar. Krisis kepemimpinan tidak dapat dilepaspisahkan dari pola laku para elit politik yang masih jauh dari api panggung kepemimpinan ideal dalam menjalankan kiprah kepemimpinan. Dalam artikel ini, penulis akan mengangkat dan mengupas tuntas beberapa kasus yang dilakukan oleh para elit politik yang berbuntut pada penodaan terhadap fitrah pemerintahan. Hal inilah, hemat penulis, menjadi indikasi primordial terciptanya krisis kepemimpinan. Mengingat persoalan krisis kepemimpinan adalah sebuah masalah akut di negeri ini, maka salah satu alternatif yang dilakukan untuk menyingkapnya ialah diskursus kritis secara terbuka. Berhadapan dengan realitas patogen krisis kepemimpinan di negeri ini, penulis mencoba untuk membaca dan menilainya dengan menggunakan kerangka konsep tipologi Pemimpin Ideal Al-Farabi, seorang filsuf terkemuka yang lahir dari rahim dunia Islam. Hemat penulis, gema konsep Pemimpin Ideal yang telah lama digagas oleh Al-Farabi membahana hingga sekarang dan relevan untuk digunakan sebagai pisau analitis dalam menganalisis realitas pola laku politik teranyar di Indonesia. Konsep Pemimpin Ideal merupakan respons Al-Farabi terhadap pola laku para elit politik yang menyimpang. Dengan konsep ini, Al-Farabi melancarkan kritiknya. Namun, telos Al-Farabi ialah membangun upaya untuk mentahtahkan utilitas para elit politik pada tempat yang seyogyannya. Penulisan artikel ini dibuat dengan menggunakan metode kepustakaan. Dengan ini, penulis memudahkan dalam proses pengumpulan data sebagai penyokong setiap argumentasi yang dibangun. Penulis mengelaborasi pelbagai data yang terkumpul dalam bagian pembahasan. Oleh karena itu, penulis berharap agar sidang pembaca dapat membaca artikel ini secara intensif.

Kata Kunci: Krisis Kepemimpinan, Para Elit Politik, Diskursus Kritis, Tipologi Pemimpin Ideal Al-Farabi.

PENDAHULUAN

Para pemimpin negara adalah deretan pelayan masyarakat (Lilijawa 2010). Barometer untuk mengukur kecakapan dalam melayani ialah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berkelindan dengan kualitas hidup yang mentereng. Guna mewujudkan kualitas hidup demikian, sang pemimpin memiliki andil besar dalam upaya pembebasan masyarakat dari pelbagai model kehidupan yang mencekik kuat. Inilah idealisme dari kiprah para pemimpin bangsa sebagai pelayan masyarakat.

Namun, tak dapat disangkal bahwa ide kepemimpinan dan praksis kepemimpinan memiliki garis demarkasi yang tajam. De facto, banyak elit politik kita, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, masih kurang cakap mengejawantahkan idealisme pelayan masyarakat dalam menjalankan kiprah sebagai pemimpin. Bahkan, pola kepemimpinan kerap tidak mencerminkan predikat sebagai pelayan masyarakat. Hal ini berdampak pada kolapsnya tatanan negara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Untuk konteks Indonesia, perilaku para elit politik de facto jelek. Mereka mudah tergoda untuk melancarkan pelbagai tindakan yang memuakan. Hari-hari ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh perilaku para elit politik yang menganggangi etika sosial dalam hidup bernegara. Pola laku 'bejat' yang dimaksud dan acap dilakukan ialah korupsi, perjudian, dan perselingkuhan. Korupsi mempertegas sikap egois yang memikirkan bonum

privatio atau kelompoknya daripada bonum communae. Atau, ketiga perbuatan tersebut mengekspresikan bahwa kualitas kepemimpinan - kualitas intelektual, kualitas moral, kualitas keperibadian, kualitas emosional, kualitas spiritual - mengalami ketergerusan. Korban dari pelbagai perilaku penyimpangan tersebut ialah kolapsnya marwah pemerintahan di Indonesia dan masyarakat. Banyak kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tidak terpenuhi baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, maupun kesehatan. Alhasil, masyarakat semakin melarat, menderita, dan makin jauh dari kehidupan yang mentereng.

Realitas patogen di atas mengindikasikan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dengan bercokol pada realitas tersebut, penulis meracik judul, “KONSEP PEMIMPIN IDEAL AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DI TENGAH KRISIS KEPEMIMPINAN DI INDONESIA.” Eksplorasi gagasan dalam tulisan ini akan dispesifikasikan dalam enam bagian. Pada bagian pertama, penulis akan memaparkan bagian pendahuluan sebagai pengantar tulisan ini. Pada bagian kedua, penulis akan menjelaskan mengemukakan metode penelitian. Pada bagian ketiga, penulis akan menjabarkan selang pandang tentang Al-Farabi dan konsep pemimpin idealnya. Pada bagian keempat, penulis akan membentangkan pelbagai kasus sebagai indikasi terjadinya krisis kepemimpinan di Indonesia. Pada bagian kelima, penulis akan menjabarkan penjelasan seputar kajian tentang relevansi konsep pemimpin ideal Al-Farabi di tengah krisis kepemimpinan di Indonesia. Pada bagian keenam, penulis akan menutup tulisan ini dengan sebuah kesimpulan singkat.

METODE

Dalam penelitian artikel ini, penulis menggunakan penelitian berbasis studi kepustakaan (library research). Artinya, titik rujukan penulisan artikel ini yaitu pada pelbagai literatur kepustakaan, seperti; buku, jurnal, artikel, dan skripsi (Dolo 2011). Selain itu, penulis juga mengakses pelbagai data yang dirilis dalam media-media elektronik yang terpercaya. Hal ini memungkinkan penulis untuk memaparkan data-data secara komprehensif dengan membangun argumentasi yang logis dan rasional sesuai dengan topik yang dikemukakan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selang Pandang Tentang Al-Farabi

Al-Farabi lahir di Farab pada 260 H = 870 M, dari turunan Turki. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzlag Al-Farabi. Dia biasa disapa Al-Farabi. Nama panggilan ini berasal dari nama tempat kelahirannya yaitu Farab. Ia lahir di Wasij (Tempat ini sekarang dikenal Atrar), Turkistan pada tahun 257 H (870 M). Ayahnya adalah seorang Irak, sedangkan ibunya seorang Turkestan, sebuah desa di Turki. Al-Farabi belajar di Bangdad, lalu menetap di Aleppo (Suriah) hingga ajal menjemputnya pada 339 H/950 M di usia ke 80 (Sulaiman 2016).

Selama mengauyuh di dunia pendidikan, dia dikenal sebagai pelajar yang sangat rajin dan cerdas. Berkat keuletannya, dia mengantongi beberapa predikat, seperti; sebagai seorang filsuf, fisikawan, ahli musik, dan penganut ajaran teologi Jabariah. Semasa hidupnya, dia telah menghasilkan banyak buku politik yang monumental, seperti; Al-Jam'u Bayna Al-Hakimayni Aflatun Al-Ilahi Wa Aristu (Pertemuan Pendapat Antara Filsuf Plato dan Aristoteles), Ara'u Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah (Pikiran-Pikiran Asasi dari Penduduk Kota/ Negeri Sempurna), dan Tah-Sil Al-Sa'adah (Mencari Kebahagiaan). Selain itu, Al-Farabi adalah filsuf Islam yang berjuang keras untuk menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam agar bisa dipahami dalam konteks agama dan wahyu (Tule 2008).

Pokok-Pokok Pemikiran Al-Farabi

Al-Farabi adalah penganut Platonisme. Karena itu, petualangan intelektualnya tidak dilepaspisahkan dari ajaran Plato termasuk tentang politik (Pureklolon 2020). Pandangan politik Plato, demikian Al-Farabi, telah membuka ruang cakrawala pengetahuannya untuk mengkaji utilitas eksistensi sebuah negara (Yamani 2002). Karya Plato tentang Politeia dan nomoi menjadi rujukan utama Al-Farabi (Tule 2008). Pergumulan seputar politik serentak membidani lahirnya dua konsep yang fenomenal yaitu konsep negara utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) dan pemimpin ideal. Hemat penulis, kedua konsep yang digagas oleh Al-Farabi tersebut menjadi ‘cemeti’ bagi para pemimpin negara yang sudah buta mata batinnya, pupus rasa kemanusiaannya, arogan, dan apatis. Guna memahami lebih mendalam terkait buah petualangan intelektual filosofis Al-Farabi, maka penulis akan membentangkannya sebagai berikut.

Konsep Negara Al-Farabi

Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah)

Manusia telah lama menyandang predikat sebagai homo socius atau makhluk sosial. Sebagai konsekuensi logisnya, manusia selalu hidup dalam kebersamaan (zoon koinonikon) (Pureklolon 2020). Pada aras demikian, setiap individu membangun upaya konspiratif dalam memenuhi pelbagai kebutuhan hidup sebagai penyokong kehidupan setiap hari. Al-Farabi membaptis upaya konspiratif ini dengan sebutan ‘asosiasi’ (al-Ijtima’at al-Insaniyah).

Corak hidup zoon koinonikon berpotensi terbentuknya komunitas-komunitas kecil dan komunitas besar atau negara (country). Jika setiap individu telah meleburkan diri dalam kehidupan sosial bermasyarakat plural, maka kemungkinan terbentuknya komunitas-komunitas kecil sangat besar. Tentang hal ini akan dijelaskan demikan. Peleburan seorang individu dengan individu lain akan membentuk keluarga. Suatu keluarga berkumpul dengan keluarga lain, lalu membentuk suatu desa. Dalam sebuah desa, terdapat begitu banyak orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing sehingga berkontribusi dalam pemenuhan basic need di antara sesama. Kemudian, suatu desa menjalin hubungan dengan desa lainnya, lalu membentuk suatu kota. Gabungan dari beberapa kota membentuk sebuah negara (Pureklolon 2020).

Kiblat berdirinya suatu negara ialah menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat mutakhir dengan usaha menciptakan suatu tatanan hidup bermasyarakat yang kondusif dan mentereng. Model kehidupan demikian terwujud dalam pelbagai rupa; kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, dan keadilan. Hadirnya keempat wujud tersebut memungkinkan masyarakat untuk meraih kebahagiaan (eudaimonia). Demikian pun sebaliknya, absennya keempat wujud tersebut memungkinkan masyarakat tetap meringkuk dalam penjara kehidupan yang penuh derita. Eudaimonia dapat dicapai bila setiap warga negara memiliki keutamaan-keutamaan hidup (virtues) (Mutiani 2020).

Keutamaan-keutamaan hidup dimaksud; (a) keutamaan pikiran dan ilmu pengetahuan. Pada level ini, independensi masyarakat sangat urgen. Setiap warga negara mesti memiliki keunggulan dalam berpikir agar proaktif dan mampu berpikir sendiri (separe aude) berkontribusi dalam kehidupan bersama. Karena itu, mereka mesti memiliki pengetahuan yang komperehensif agar tidak jatuh dalam lumpur kebodohan, (b) keutamaan sikap selektivitas dalam penggunaan barang. Warga negara yang baik mesti cakap dalam mendayagunakan barang hasil kreatifitasnya secara baik guna mencapai keuntungan yang efektif, (c) keutamaan moral. Spektrum keutamaan moral menyangkut pola pikiran, pola tutur, dan pola laku. Setiap warga negara mesti berpikir, bertutur, dan berperilaku secara sopan demi tidak terciptanya dekadesi moralitas dan mencederai kemanusiaan baik diri sendiri maupun sesama (the others), (d) keutamaan bekerja. Manusia adalah homo faber,

mahluk pekerja. Setiap polis mesti mengembangkan potensi diri secara bebas dan kreatif agar membawa kemaslahatan dalam menapaki kehidupan sebagai warga negara.

Lawan Negara Utama (Mudhaddah Al-Madinah Al- Fadilah)

Konsep negara Mudhaddah Al-Madinah Al- Fadilah merupakan lawan dari konsep Al-Madinah Al-Fadilah. Jika negara Al-Madinah Al-Fadilah mumpuni dalam menjawab pelbagai kebutuhan warga negara, dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, maka negara Mudhaddah Al-Madinah Al- Fadilah mengabaikan pelbagai kebutuhan tersebut. Konsep negara Mudhaddah Al-Madinah Al- Fadilah, demikian Al-Farabi, hendak menggambarkan realitas sebuah negara yang bobrok dan antagonistik (chaos). Karena itu, Al-Farabi mengklasifikasikan Mudhaddah Al-Madinah Al- Fadilah ke dalam tiga bentuk yaitu; negara bodoh, fasik, dan sesat (Sukardi 2017).

Pertama, Negara Jahiliah (Al-madinah al-jahiliah). Negara jenis ini didomisili oleh warga negara yang tidak memiliki ideologi. Semua warga negara menjalankan kehidupan secara serampangan. Di dalam negara ini nyaris tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur pola laku masyarakat. Semua polis bebas mengekspresikan diri secara bebas tanpa terikat pada aturan-aturan tertentu. Mereka akan bahagia bila mengalami kesehatan badan, kebebasan melampiaskan hawa nafsu, mencari kehormatan, rakus, keji, dan maniak terhadap harta kekayaan. Hal ini turut terciptanya sebuah negara antagonistik, penuh dengan pertentangan (chaos). Bagi warga negara yang memukimi negara jenis ini, Absenya keenam hal tersebut dipandang sebagai sebuah penderitaan. Kedua, Negara Fasiq (Al-Madinah Al-Fasiqkah). Negara jenis ini didiami oleh warga negara yang memiliki pengetahuan tentang kebahagiaan. Mereka memiliki nilai-nilai moral sebagai pedoman dalam berperilaku. Bahkan, mereka mengenal Allah. Namun, nilai-nilai moral dan pengetahuan tentang Allah hanyalah konsep belaka tanpa makna. Nilai-nilai yang telah diasosiasikan dalam kehidupan bernegara sekadar utopia. Praksis hidup mereka tidak selaras dengan pengetahuan moral yang diperoleh. Mereka acap bertingkah di luar koridor nilai-nilai moral. Bahkan, mereka acap secara sengaja untuk mengganggu nilai-nilai moral yang telah lama dihidupi dalam kehidupan bernegara.

Ketiga, Negara Sesat (Al-Madinah Al-Dhallah). Warga negara yang mendiami sebuah negara sesat menyakini realitas adanya dunia akhirat dan eksistensi Tuhan. Namun, mereka kerap melakukan cara-cara yang tidak etis dalam menyembah Tuhan. Mereka menyembah patung-patung, pohon-pohon, dan batu-batu besar. Mereka juga memiliki para pemimpin yang egois dan tamak. Komitmen para pemimpin mereka untuk melayani masyarakat mudah pupus seketika menduduki tampuk kekuasaan. Di mana, mereka (para elit politik) bertendensi menjadikan tampuk kekuasaan sebagai lokus kondusif untuk memenuhi kebutuhan pribadi daripada memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Alhasil, antara para pemimpin dan masyarakat memiliki gap yang lebar, di mana para pemimpin semakin kaya, sedangkan masyarakat semakin menderita dan jauh dari kehidupan mentereng.

Konsep Pemimpin Ideal

Diskursus seputar pemimpin ideal selalu meruncing pada cita-cita ‘bertahtanya’ tugas mulia untuk mengabdikan pada masyarakat (Haryanto 2014). Pemimpin ideal, demikian Al-Farabi, adalah motor penggerak dalam membangun kehidupan yang mentereng di masyarakat (Rizaty 2023). Karena itu, pemimpin ideal, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, mumpuni dalam mengemban tugas kepemimpinan guna meraih idealisme tersebut. Artinya, memenuhi kebutuhan masyarakat dijadikan sebagai target utama yang mesti dicapai. Inilah konsekuensi logis bila menduduki tampuk kekuasaan di dalam sebuah negara.

Al-Farabi pernah menggagas konsep tentang pemimpin ideal. Dia menegaskan bahwa setiap orang yang ingin memimpin atau yang sedang memimpin mesti memenuhi kriteria-kriteria pemimpin ideal. Spektrum dari pelbagai kriteria yang dikemukakan oleh Al-Farabi sangat luas, yaitu; setiap orang yang menjadi pemimpin mesti memiliki anggota tubuh yang sempurna, setiap orang yang menjadi pemimpin mesti cerdas, pemimpin yang baik mesti frontal terhadap kritikan, pemimpin mesti mencintai kebenaran, pemimpin mesti bermurah hati, dan Seseorang yang Tidak Nafsu akan Uang (Love of Lucre) (Mulyadhi Kartanegara, 2002). Terkait beberapa kriteria pemimpin ideal yang digagas oleh Al-Farabi, penulis akan menjabarkan penjelasannya secara komprehensif sebagai berikut.

Seseorang yang Memiliki Anggota Tubuh Sempurna

Pemimpin harus tampil prima. Artinya, dia tidak boleh cacat baik secara fisik maupun psikis. Ketika sang pemimpin memiliki tubuh yang sempurna, maka kiprah kepemimpinannya akan berjalan secara efektif. Begitupun sebaliknya, sang pemimpin akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya bila menyandang predikat sebagai seorang yang cacat. Al-Farabi sulit membayangkan bila ada sosok pemimpin di dalam sebuah negara menyandang predikat sebagai orang cacat. Dia, demikian Al-Farabi, akan menemukan kesulitan dalam melaksanakan kiprah kepemimpinannya. Contoh; bila ada para elit politik yang lumpuh atau buta, maka pertanyaan yang muncul ke permukaan ialah bagaimana dia dapat mengunjungi dan melihat realitas polis? Sementara, idealnya bahwa sang pemimpin mesti mengetahui dan memahami realitas masyarakat yang dipimpinnya agar segenap kebijakan yang akan dibuat sedapat mungkin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Seseorang yang Cerdas

Berbicara seputar pemimpin yang cerdas tidak dapat dilepaspisahkan dengan kualitas intelektualnya. Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang berjiwa revolusioner. Dia pandai dalam menelurkan gagasan, strategi, dan ide-ide kreatif demi menciptakan kebaikan bersama secara berkelanjutan (nachhaltig) dalam negara yang didiaminya (Wattimena 2015). Selain itu, dia mesti cerdas dalam membaca realitas kehidupan masyarakat yang acap disesaki oleh beragam persoalan lalu menganalisisnya sembari berusaha semaksimal mungkin untuk mencari alternatif solutif guna meminimalisasi penderitaan yang mencekik polis (Beoang, 2014). Di sini, dia memiliki andil besar dalam upaya pembebasan masyarakat dari beragam persoalan hidup. Karena itu, dia tidak apatis terhadap masyarakat.

Seseorang yang Frontal Terhadap Kritikan

Tipe ini berhubungan erat dengan kualitas emosional. Pemimpin ideal tidak alergi terhadap kritik yang dilancarkan oleh masyarakat. Dalam pandangan Al-Farabi, pemimpin yang alergi terhadap kritikan tidak pantas menduduki tampuk kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Pemimpin dengan tipologi demikian berpotensi untuk menjadi pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter mudah terjebak dalam glorifikasi diri yang hiperbolis. Hal ini diperparah oleh keyakinan bahwa mereka telah mencapai tangga kesuksesan dan merasa lebih tahu tentang situasi dan kondisi masyarakat. Dampak dari sikap tersebut ialah mereka acap blunder dalam membuat kebijakan dan tidak menjawab tantangan mutakhir kehidupan masyarakat yang mencekik kuat. Lalu, bagaimana pandangan Al-Farabi tentang pemimpin yang frontal terhadap kritikan?

Bagi Al-Farabi, pemimpin yang frontal terhadap kritikan selalu menyendengkan telinga guna mendengarkan kritikan masyarakat yang dipimpinnya. Baginya, kritikan bukanlah sebuah penghinaan atau cemoohan, melainkan pengontrol setiap kebijakan agar terhindar dari kebijakan yang menyimpang (Lilijawa 2010). Bahkan, dia menjadikan kritikan sebagai sarana untuk mengintrospeksi diri. Sebab, sistem pemerintahan akan menjurus pada titik kehancuran bila aktor politik menutup telinga bagi beragam suara yang

mengungkapkan kepincangan yang sedang terjadi di dalamnya. Namun, kritikan yang disampaikan mesti didukung oleh argumen yang jelas. Artinya, seorang kritikus tidak bisa membuat kritikan sesuka hati tanpa pendasaraan yang jelas.

Seseorang yang Mencintai Kebenaran

Sikap mencintai kebenaran berkelindan dengan kualitas kepribadian seseorang. Pemimpin ideal yang mencintai kebenaran selalu menjalankan tugas kepemimpinan di bawah panji kebenaran. Kebenaran yang dimaksud lebih menjurus pada pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang buruk; mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Pola kepemimpinan yang berpedomaan pada kebenaran akan berujung pada kiblat kepemimpinan in se yaitu melayani kepentingan umum (*bonum commune*) bukan kepentingan pribadi (*bonum privatio*) atau kelompok tertentu (Lilijawa 2007). Jika pengetahuan tentang kebenaran ada dalam diri seorang pemimpin, maka segala penyelewengan dan kebobrokan dalam sebuah negara niscaya tidak akan tercipta. Karena itu, tekad yang kuat dan tegas untuk berpihak pada kebenaran mesti mendarah daging dalam diri sang pemimpin.

Seseorang yang Bermoral

Tipe pemimpin bermoral berkelindan dengan kualitas moral. Moralitas adalah fondasi serentak menjadi bagian esensial dalam perkara kepemimpinan (Lilijawa 2010). Kualitas moral sang pemimpin dapat tercermin dalam mind set, pola laku, dan pola tutur (Sasi 2019). Seseorang pemimpin akan diberi label sebagai moralis bila perilakunya selaras dengan norma-norma yang berlaku. Dengan berpijak dengan nilai-nilai moral tertentu, dia dimampukan untuk membuat pertimbangan apa yang baik dan yang buruk sebelum bertindak (Bei 2021). Pemimpin yang bermoral selalu menampilkan pola kepemimpinan yang mentereng dan selalu bergerak dalam koridor etika inklusif dalam menjalankan kiprahnya sebagai pelayan masyarakat. Dia menaruh perhatian total terhadap masyarakat yang sedang lapar akan kesejahteraan dan dahaga akan keadilan dan eudaimonia. Dengan demikian, sosok pemimpin ideal dengan tipologi seperti ini, demikian Al-Farabi, selalu tampil sebagai motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Seseorang yang Tidak Nafsu akan Uang (Love of Lucre)

Salah satu godaan yang menjatuhkan seorang pemimpin ialah uang. Jika sang pemimpin mudah tergiur oleh uang, maka dia akan mudah terperosok jatuh ke dalam lubang korupsi, yang memperjuangkan kepentingan basic need mereka sendiri. Korupsi dapat meruntuhkan tatanan negara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Perilaku koruptif mengandaikan tindakan ‘bejat’ dan barbarisme. Jika korupsi sering dilakukan, maka katastrofe dalam sebuah negara akan segera tercipta. Tentu, realitas ‘kelam’ dalam sebuah negara tidak digandrungi oleh semua orang. Oleh karena itu, guna mencapai pemimpin ideal yang diwartakan oleh Al-Farabi, seorang pemimpin mesti mengenggam prinsip *bonum vaciendum*, *malum fitandum* (Lilijawa 2010).

Dengan bercokol pada pelbagai kriteria di atas, Al-Farabi hendak mengemukakan bahwa menjadi pemimpin dalam suatu bangsa bukan sembarangan orang. Seseorang pantas menjadi pemimpin bila memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Inilah langkah primordial, demikian Al-Farabi, dalam mempurifikasi lembaga pemerintahan sebuah negara. Dengan demikian, kolapsnya tatanan negara niscaya tidak akan tercipta. Oleh karena itu, polis mesti tidak memberi space sedikit pun kepada seseorang untuk menjadi pemimpin bila keenam tipologi pemimpin ideal yang digagas oleh Al-Farabi tidak melekat pada dirinya. Ini adalah langkah antisipatif dalam mencegah para elit politik destruktif yang hendak merebut tampuk kekuasaan dengan telos untuk meraih keperluan pribadi. Dengan demikian. Hal ini bertujuan agar melahirkan sosok pemimpin yang bermoral, berwibawah,

dan Dengan demikian, tampuk kekuasaan tidak akan pernah diduduki oleh para pemimpin yang bar-bar tidak akan pernah ada dalam sebuah negara. Yang ada hanyalah sosok pemimpin secara intensif berusaha untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Oleh karena itu, krisis kepemimpinan dalam sebuah negara niscaya tidak terjadi.

Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Krisis kepemimpinan adalah salah satu masalah akut di Indonesia. Titik anjak terjadinya krisis kepemimpinan secara terang benderang berkelindan dengan pola laku para elit politik di negeri ini, hemat penulis, masih jauh dari api panggung pola laku kepemimpinan ideal. Idealisme untuk menjawab kebutuhan masyarakat sangat mudah tergantikan dalam pragmatisme. Hal ini diperparah oleh sikap rakus, tamak, dan hasrat yang tidak terbatas telah mengurita tubuh mereka. Alhasil, mereka dengan mudah terperosok ke dalam pelbagai tindakan yang menyimpang dan emoh untuk membuat kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai dampak lanjutnya, masyarakat semakin menderita. Bersamaan dengan itu, tatanan hidup negara semakin jauh dari model kehidupan mentereng.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat dan mengupas tuntas pelbagai perilaku tak bermoral yang kerap diaktori oleh para elit politik di bumi Nusantara. Pelbagai perilaku ketimpangan dimaksud, yaitu; korupsi, perjudian, dan perselingkuhan. Hemat penulis, kasus yang menimpa para elit politik kita hari-hari ini berkelindan dengan ketiga perilaku tersebut. Berikut, penulis akan membentangkan deretan ketiga kasus tersebut, hemat penulis, sebagai akar dari krisis kepemimpinan di seantero bumi Nusantara.

Korupsi

Korupsi diafirmasi sebagai tindakan kejahatan yang merugikan negara dengan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) (Chazawi 2016). Untuk konteks Indonesia, korupsi merupakan wacana aktual yang kerap menjadi buah tutur masyarakat (Wijaya 2014). Korupsi tidak dapat dilepaspisahkan dengan para elit politik. Bahkan, mereka adalah aktor utama (*the main actor*) dalam melakukan tindakan 'bejat' tersebut. Di Indonesia, kasus korupsi sering terjadi setiap tahun.

Pada bagian ini, penulis akan menderetkan beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di tanah air serentak merugikan negara, yakni; (a) penyerobotan lahan Riau seluas 37.095 hektar yang melibatkan Surya Darmandi, pemilik PT Duta Palma Group, dan Thamsir Rachman, mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 sehingga merugikan negara sebesar Rp 39,7 triliun, (b) kasus korupsi rasuah kondensat yang melibatkan PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) sehingga merugikan negara sebesar Rp 37,8 triliun, (c) kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dilakokan oleh Menkominfo Johnny Gerard Plate dengan kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795, (d) kasus korupsi proyek E-KTP yang melibatkan berbagai pihak dengan merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun (Chatherine 2023).

Lalu, apakah korupsi pantas untuk dilakukan oleh para elit politik? Korupsi tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal ini secara terang benderang termaktub dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bab II tentang Kode Etik pada bagian 3, tentang Hubungan dengan Mitra Kerja, pasal 4 ayat 2 yang berbunyi demikian, "Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme." Aturan tersebut secara terang-terangan melarang para elit politik untuk melakukan korupsi.

Perjudian

Terlepas dari persoalan seputar tindakan koruptif, para elit politik di bumi Nusantara juga kerap terlibat dalam kasus perjudian. Banyak para elit politik kita yang terlibat dalam

kasus perjudian. Penulis akan menderetkan beberapa kasus perjudian yang melibatkan para elit politik di Indonesia di bawah ini.

Pada Juni 2023 lalu, masyarakat Nusantara dikejutkan oleh sebuah informasi yang mengungkapkan bahwa salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Cinta Mega, tertangkap kamera sedang bermain game slot online saat paripurna (Detikcom 2023). Tidak hanya itu, Aparat Kepolisian NTT juga menangkap seorang anggota DPRD kota Kupang berinisial HKD alias H, karena kedapatan bermain judi Kartu. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp 2,3 juta dan kartu remi merek Playing (Sigiranus Marutho Bere 2018).

Mungkin, masih banyak para elit politik di bumi Nusantara yang terlibat dalam kasus perjudian. Kedua kasus yang diangkat oleh penulis menjadi contoh untuk menggambarkan kualitas para elit politik yang masih jauh dari api panggung konsep pemimpin ideal. Jika pola laku demikian sudah mendarah daging, maka tampuk kekuasaan di negeri ini lambat laun akan menjadi locus strategis untuk melakukan pelbagai tindakan yang meluluhkan integritas negeri ini. Sebagai konsekuensi logisnya, pesimisme masyarakat akan eksistensi para elit politik dan predikat sebagai pelayan masyarakat akan tampak ke atas permukaan.

Lalu, apakah para elit politik layak terlibat dalam perjudian? Tentu, tidak. Para elit politik tidak diperkenankan melakukan perjudian. Secara hukum, dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bab II tentang Kode etik pada bagian 2, tentang Integritas, pasal 3 ayat 3, ditegaskan bahwa, “Anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Perselingkuhan

Selain kasus perjudian, kasus perselingkuhan juga kerap menjadi wacana aktual yang kerap diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun tak kala dilakukan oleh para elit politik. Pada 2020 lalu, kasus perselingkuhan menjadi wacana aktual yang mengemparkan di bumi Nusantara, takala anggota DPR menjadi aktor utamanya. Berikut, penulis akan menderetkan beberapa kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR di Indonesia.

Pada Januari 2020, video perselingkuhan James Arthur Kojongian, ketua DPRD Sulawesi Utara, dengan Michaela Paruntu, adik dari Bupati Minahasa Selatan, viral di dunia maya (Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok). Selain kasus James dan Michaela, anggota DPR lain yang kepergok sedang berselingkuh ialah Kadek Dwi Yustianawati, komisi IV DPRD Bali, dan I Kadek Diana, ketua komisi III DPRD Bali. Sebagai konsekuensinya, keduanya menuai dosa dalam rupa deprivasi yang diumumkan oleh Wayan Koser, ketua PDIP, di kantor DPD PDIP Bali pada Minggu 15 Maret 2020 (Mahadi 2021). Selain itu, kasus perselingkuhan lainnya juga terjadi di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kasus tersebut diaktori oleh anggota DPRD fraksi PDI-P yang berinisial MGPR (40) bersama NN di kamar mandi.

Bahwasannya, para elit politik memiliki peran ganda. Pertama, sebagai mandataris masyarakat. Tugas yang dipikul tidak dilepaspisahkan dengan upaya memajukan hidup masyarakat. Karena itu, masyarakat mesti dibebaskan dari pelbagai situasi dan kondisi yang ‘mencekik’ kuat. Kedua, sebagai ‘model’ bagi masyarakat. Para elit politik menjadi contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pola laku dan pola tutur mesti mendapat perhatian serius dari para elit politik sendiri agar tidak menimbulkan persoalan yang ‘mengganggu’ ketenangan publik. Namun, idealisme tersebut nyaris tidak sepenuhnya ditampilkan oleh para elit politik dalam menjalankan kiprah kepemimpinan. De facto, masih

ada segelintir para elit politik yang bertindak tidak paralel dengan peran ganda tersebut, sebagaimana beberapa kasus di atas. Miris!!

Relevansi Konsep Pemimpin Ideal Al-Farabi di Tengah Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Di tengah krisis kepemimpinan yang melanda di bumi Nusantara ini, konsep pemimpin ideal Al-Farabi memainkan peranannya. Konsep pemimpin ideal yang digagas Al-Farabi berkiblat pada terbentuknya Al-Madinah Al-Fadhilah. Al-Madinah Al-Fadhilah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai aras ini, tampuk kekuasaan mesti diduduki oleh pemimpin ideal. Pemimpin ideal yang dimaksud ialah mereka yang mumpuni dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat (The servant of people).

Korupsi dan Seseorang yang Tidak Nafsu Akan Uang (Love of Lucre)

Korupsi adalah akar krisis kepemimpinan di Indonesia. Korupsi mengandaikan perilaku betrayal of trust dan abuse of power. Betrayal of trust meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika praktik korupsi semakin marak terjadi, maka kepercayaan masyarakat pada kualitas para elit politik akan tergerus dan turbulensi dalam pusaran pemerintahan akan segera tercipta. Alhasil, masyarakat akan skeptis terhadap eksistensi para elit politik dan setiap kebijakan yang mereka telurkan, sedangkan abuse of power, di mana fungsi tampuk kekuasaan yang seharusnya digunakan sebagai tempat penampung aspirasi dan 'jeritan' masyarakat, telah memudar. Tampuk kekuasaan dijadikan tempat strategis untuk meraup harta sebanyak-banyaknya tanpa mengubris nasib masyarakat. Artinya, nasib masyarakat tidak ada dalam lembaran kerja mereka.

Pemimpin koruptif tidak mendapat tempat dalam pemikiran Al-Farabi. Pemimpin koruptif hanya merugikan negara dan masyarakat. Pemimpin koruptif mengandaikan sikap apatisnya terhadap pelekian masyarakat yang sedang dalam situasi 'paceklik'. Ini adalah alasan primordial bagi Al-Farabi yang melatari lahirnya konsep tipologi pemimpin ideal yang tidak rakus terhadap uang. Dengan mengikuti alur argumentasi Al-Farabi tersebut, penulis mengafirmasi bahwa uang negara tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan kepentingan negara dalam memajukan kesejahteraan umum bagi polis. Bagi Al-Farabi, pemimpin koruptif mengandaikan individu yang tidak bermoral sehingga berpotensi terjerembab dalam aktus korupsi.

Perjudian dan Seseorang yang Mencintai Kebenaran

Para elit politik seyogyannya, hemat Al-Farabi, tidak diperkenankan untuk terlibat dalam perjudian sebagaimana beberapa kasus yang diangkat oleh penulis di atas. Para elit politik mesti memusatkan perhatian penuh pada masyarakat. Jika para elit politik merasa nyaman dalam perjudian, maka apatisme terhadap tanggungjawabnya sebagai mandataris masyarakat menjadi konsekuensi logisnya. Hal ini juga kontra dengan tipologi pemimpin ideal yang mencintai kebenaran dalam perspektif Al-Farabi.

Pemimpin yang mencintai kebenaran selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak mencoreng reputasinya sebagai sang pemimpin. Pemimpin yang mencintai kebenaran mampu membuat distingsi tentang perbuatan yang baik dan buruk; perbuatan yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Jika pengetahuan tentang kebenaran ada dalam diri seorang pemimpin, maka segala penyelewengan dan kebobrokan dalam sebuah negara niscaya tidak akan tercipta. Karena itu, tekad yang kuat dan tegas untuk berpihak pada kebenaran mesti mendarah daging dalam diri sang pemimpin.

Perselingkuhan dan Seseorang yang Tidak Bermoral

Hemat penulis, perselingkuhan adalah tindakan mematahkan janji untuk tetap setia (loyal) terhadap pasangan hidup yang telah terikat lewat peristiwa pernikahan. Kasus perselingkuhan yang diangkat oleh penulis di atas mengandaikan bahwa loyalitas para elit politik pada pasangan hidup telah mengalami ketergerusan. Jika perselingkuhan dilakukan

oleh para elit politik, maka predikat yang telah lama disematkan sebagai model bagi masyarakat dipertanyakan.

Para elit politik nyaris tidak berdaya bila hasrat untuk berselingkuh bergejolak. Hal ini diperparah bila kemampuan untuk mengekang hawa nafsu rendah. Mereka nyaris kehilangan daya untuk mengontrol diri. Sebagai dampak lanjutnya, fitrah para elit politik menjadi kolaps dan tubuh pemerintahan ‘ditelanjangi’. Namun, meskipun banyak elit politik yang menuai dosa di kala berselingkuh, semisal; dipenjara atau dideprivasi, tapi kasus perselingkuhan marak terjadi. Hukuman yang diberikan kepada pelaku perselingkuhan sebelumnya tidak memberikan efek jera bagi yang lainnya (the others). Di hadapan faktum perselingkuhan yang ada, para elit politik, hemat penulis, sebetulnya telah gagal mendapatkan makna identitas dan status sosial mereka dalam negara. Hal ini seakan-akan menggenapi sebuah adagium kuno yang berbunyi, “Mati satu, tumbuh seribu.”

Al-Farabi tidak menginginkan para elit politik dalam suatu negara melakukan perselingkuhan. Bagi penulis, perselingkuhan, bila disandingkan dengan tipologi pemimpin ideal Al-Farabi, dipandang sebagai tindakan tidak etis sebab mengganggu nilai-nilai moral. Para elit politik yang berselingkuh menunjukkan rendahnya kualitas moral dalam dirinya. Jika kualitas moral tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka dia tidak layak menduduki tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, dia mesti dengan segera hengkang dari tampuk kekuasaan.

KESIMPULAN

Tugas para elit politik mesti ditatahkan kembali pada tempatnya. Karena itu, para elit politik mesti memiliki kesadaran akan predikatnya sebagai pelayan masyarakat. Jika tampuk kekuasaan ditaburi oleh para pemimpin ideal, maka kesejahteraan dalam masyarakat niscaya tercipta. Probabilitas tersebut akan menjadi realitas, bila tipologi pemimpin ideal Al-Farabi mendarah daging dalam diri para elit politik. Tipologi pemimpin ideal Al-Farabi, yaitu; seseorang yang memiliki anggota tubuh sempurna, seseorang yang cerdas, seseorang yang frontal terhadap kritikan, seseorang yang mencintai kebenaran, seseorang yang bermoral, dan Seseorang yang Tidak Nafsu Akan Uang (Love of Lucre).

DAFTAR PUSTAKA

- Bei, Patrisius Epin Du dan Dionisius. 2021. “KONTRIBUSI FILSAFAT EKSISTENSIALISME KIERKEGAARD DALAM MEMBANGKITKAN HARAPAN DI TENGAH PENGALAMAAN KEPUTUSASAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19.” *Ledalero* 18: 88.
- Chaterine, Rahel Narda. 2023. “Deretan Korupsi Terbesar di Indonesia: Kasus Surya Darmadi sampai BTS 4G.” 8 Mei 2023. 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g?page=all>.
- Chazawi, Adami. 2016. *HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. 1 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Detikcom, Tim. 2023. “Anggota DPRD DKI Jakarta Diduga Main Slot saat Rapat, Ini 4 Hal Diketahui.” 22 Juli 2023. 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6835913/anggota-dprd-dki-jakarta-diduga-main-slot-saat-rapat-ini-4-hal-diketahui>.
- Dolo, Fredinandus Romanus. 2011. “TINJAUAN KRITIS ATAS PEMIKIRAN SOFISME MENGENAI RETORIKA (Upaya untuk Mempertimbangkan Kebenaran dalam Hidup Berpolitik).” *Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero*.
- Haryanto, Venan. 2014. *RANAH POLITIK MENURUT PIERRE BOURDIEU*. 1 ed. Maumere: Ledalero.
- Lilijawa, Isidorus. 2007. *Mengapa Takut Berpolitik?* 1 ed. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- . 2010. *Perempuan, Media dan Politik*. 1 ed. Maumere: Ledalero.
- Mahadi, Samala. 2021. “Memalukan, 5 Anggota DPR ini dipecat Karena Ketahuan Selingkuh. Ada

- dari Partai Golkar Dan PDIP!” 24 September 2021. 2021. <https://berita.99.co/anggota-dpr-selingkuh/>.
- Mutiani, Tika. 2020. “Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini.” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* vl: 35.
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2020. *NEGARA HUKUM DALAM PEMIKIRAN POLITIK*. 5 ed. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sasi, Florida. 2019. “KEBAJIKAN INTELEKTUAL: FONDASI KEBIJAKSANAAN BAGI MAHASISWA MILENIAL.” *Ledalero* 15: 79.
- Sigiranus Marutho Bere, Farid Assifa. 2018. “Main Judi Kartu, Seorang Anggota DPRD Kota Kupang Ditangkap Polisi.” 2 Mei 2018. 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/05/02/16061721/main-judi-kartu-seorang-anggota-dprd-kota-kupang-ditangkap-polisi>.
- Sukardi, Imam. 2017. “NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMIKIRAN ALFARABI.” *AL-A'RAF* xiv: 291–93. file:///E:/dokument/artikel/wilu/stfathonah,+Al-A'raf+Vol.+XIV+No.2+2017+_7.pdf.
- Sulaiman, Asep. 2016. *Mengenal Filsafat Islam*. Diedit oleh Aulia Millatina Fajwah. 1 ed. Bandung: Yrama Widya.
- Tule, Philipus. 2008. *Mengenal & Mencintai Muslim & Muslimat*. 2 ed. Maumere: Ledalero.
- Wattimena, Reza A.A. 2015. *Filsafat Sebagai Revolusi Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, David. 2014. *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Yamani. 2002. *Antara Al-Farabi dan Khomeni: FILSAFAT POLITIK ISLAM*. 1 ed. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI.